

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Apeldoorn, L.J. van., 1993, Pengantar Ilmu Hukum (terjemahan Oetarid Sadino), Pradnya Paramita, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly., 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas, Jakarta.
- Black, Henry Campbell., 1990, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, Co., St. Paul, Minnesota, USA.
- Budiarjo, Miriam., 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Erwin, Moh., 2011, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Huijbers, Theo, 1999, *Filasafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad., 2005, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, Erlangga, Jakarta.
- Lubis, Andi Fahmi., Anggraini, Anna Maria Tri., Toha, Kurnia., Kagramanto, Budi., M. Hawin., Sirait, Ningrum Natasya., Sukarmi., Maarif, Syamsul., Silalahi, Udin., 2009, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta.
- Marwah, Diah M., 2003, *Restrukturisasi BUMN di Indonesia: Privatisasi atau Korporatisasi*, Literata Lintas Media, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud., 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud., 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

- Pasha, Musthafa Kamal., Lasijo., Mudjijana., Muqodas, Fahmi., 2002, *Pancasila dalam Tinjauan Historis, Yuridis, dan Filosofis*, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta.
- Pierson, Christopher., 2007, *Welfare State: The New Political of Welfare*, The Pennsylvania State University Press, Pennsylvania.
- Rahardja, Pratama., Manurung, Mandala., 2006, *Teori Ekonomi Mikro: Suatu Pengantar*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto., 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Rawl, John, 1999, *A Theory of Justice*, The President and Fellowship of Harvards University Press, New York, USA.
- Simarmata, Henry T., 2008, *Negara Kesejahteraan dan Globalisasi: Pengembangan Kebijakan dan Perbandingan Pengalaman*, Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina, Jakarta.
- Sirait, Ningrum Natasya., 2011, *Hukum Persaingan di Indonesia: UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Pustaka Bunga Press, Medan.
- Soekanto, Soerjono., Mamudji, Sri., 2010, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sukirno, Sadono., 2016, *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sunggono, Bambang., 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tanya, Bernard L., Simanjuntak, Yoan N., Hage, Markus Y., 2006, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, CV Kita, Surabaya.
- Triwibowo, Darmawan., Bahagijo, Sugeng., 2006, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakarta.

Usman, Rachmadi., 2013, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Warassih, Esmi., 2005, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang.

Yudho, Winarno., 2002, *Sosok Guru dan Ilmuwan yang Kritis dan Konsisten: Kumpulan Tulisan Peringatan 70 Tahun Prof. Soetandyo Wignjosoebroto*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.

2. Artikel Jurnal

Anggraini, A.M. Tri., “Aspek Monopoli atas Cabang Produksi yang Menguasai Hajat Hidup Orang Banyak Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha”, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol.2, No.4, Februari 2010.

Asshiddiqie, Jimly., “Memperkenalkan Gagasan Konstitusi Ekonomi”, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 3, No. 2, 2013.

Ferragina, Emanuele., Seeleib-Kaiser, Martin., “Welfare Regime Debate: Past, Present, Futures”, *Policy and Politics*, Vol.39, No.4, 2011.

Posner, Richard A., “The Social Cost of Monopoly and Regulation”, *Journal of Political Economy*, Vol.83, Agustus 1975.

Sjahdeini, Sutan Remy., “Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.10, 2000.

Suastama, Ida Bagus Radendra., “Asas Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-undang Migas dan Ketenagalistrikan”, *Mimbar Hukum*, Vol.24, No.2, Juni 2012.

V. Hadiyono, “Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara *Welfare State* dan Tantangannya”, *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, Vol.1, No.1, Agustus 2020.

Wantu, Fence M., “Antinomi dalam Penegakah Hukum oleh Hakim”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.19, No.3, Oktober 2007.

3. Makalah/Perkuliahan

Triatmodjo, Marsudi., “Teori Hukum”. Bahan Ajar Perkuliahan Teori Hukum pada Magister Ilmu Hukum – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 21 November 2020.

4. Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada 28 Februari 2022.

Berdikari, “Bisnis Kami”, <https://berdikari-persero.co.id/>, diakses pada 16 Mei 2022.

Bisnis.com, “Usung Nama ID FOOD, Holding BUMN Pangan Resmi Diluncurkan”, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220112/12/1488245/usung-nama-id-food-holding-bumn-pangan-resmi-diluncurkan>, diakses pada 16 Mei 2022.

Britannica Encyclopedia, “Welfare State”, <https://www.britannica.com/topic/welfare-state>, diakses pada 13 April 2022.

Bulog, “Bisnis”, <http://www.bulog.co.id/bisnis/produk/>, diakses pada 16 Mei 2022.

Garam, “Produk”, <https://www.ptgaram.com/Barang>, diakses pada 16 Mei 2022.

Merdeka.com, “4 Perusahaan Pembuat Peralatan Canggih Militer Asal Indonesia”, https://www-merdeka-com.translate.goog/peristiwa/4-perusahaan-pembuat-peralatan-canggih-militer-asal-indonesia.html?_x_tr_sl=id&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=op,sc, diakses pada 15 Mei 2022.

Perikanan Indonesia, “Produk”, <http://www.perikananindonesia.co.id/100-produk>, diakses pada 16 Mei 2022.

Pindad, Konsolidasi 6 BUMN Industri Strategis, NDHI Gelar Rapat Koordinasi di Bali”, <https://www.pindad.com/konsolidasi-6-bumn-industri-strategis-ndhi-gelar-rapat-koordinasi-di-bali>, diakses pada 15 Mei 2022.

Sang Hyang Seri, “Produk”, <http://ptsanghyangseri.co.id/>, diakses pada 16 Mei 2022.

Tirto.id, “Sejarah Tiga Produsen Alutsista Indonesia”, <https://tirto.id/sejarah-tiga-produsen-alutsista-indonesia-gafU>, diakses pada 15 Mei 2022.

5. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Telekomunikasi menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2657).
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317).
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3391).
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881).
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226).
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722).
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849).
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956).

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052).

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343).

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492).

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1970 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan PT Krakatau Steel (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 52).

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Boma, Perusahaan Negara (PN) Bisma dan Perusahaan Negara (PN) Indra menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 2).

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Sabang Merauke, PN Barata, dan Perusahaan Negara Pelaksanaan Pembangunan Proyek-proyek Industri Dasar menjadi Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 3).

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangun Negara (PN) Perhubungan Udara “Garuda Indonesian Airways” menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 87).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara “Pelayaran Nasional Indonesia” menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973).

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1975 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Dok dan Perkapalan Surabaya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Industri Pesawat Terbang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979).
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1977 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Industri Perkapalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dok dan Galangan Kapal menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1981 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Industri Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 1).
- Peraturan Pemerintah 4 Tahun 1983 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Industri Logam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 4).
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 21).
- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1990 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dok dan Perkapalan Tanjung Priok, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelita Bahari, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kodja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Garam menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Industri Elektronika Profesional dan Komponen
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Dahana menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Telekomunikasi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Sang Hyang Seri menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 34).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwijaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 64).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 31).

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 50).

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Penetapan Bentuk PT Perusahaan Pilot Proyek Berdikari menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47).

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 69).

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96).

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6440).

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6441).

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 154).

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 15).

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138).

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Bulog dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 105).

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 106).

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 17 (Praktik Monopoli) Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

6. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.